

# DIPLOMACY OF SAUDI ARABIA IN THE SETTLEMENT OF THE DISPUTE OF TIRAN AND SANAFIR ISLAND WITH EGYPT 2016-2017

**Author: Rifki Adha**

**(e-mail: [rifkiadha13@gmail.com](mailto:rifkiadha13@gmail.com))**

**Pembimbing: Dr. H. Mhd Saeri, M.Hum**

Bibliografi: 23 Jurnal, 32 Buku, 14 Website, 1 Thesis

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H. R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28293

## ***Abstract***

*This research aims as a study of diplomacy in the settlement of island disputes by taking a case study of the disputed islands of Tiran and Sanafir between Saudi Arabia and Egypt. This research tries to apply the theory of diplomacy and state sovereignty in looking at protecting the territory from unilateral recognition from countries that try to dominate by force and seek cooperation when the state is under pressure. Through this research, the author finds that the dynamics of Saudi-Egyptian relations have experienced ups and downs in resolving disputes between the two islands and the diplomacy used by Saudi Arabia to take over its sovereignty again by means of bourgeois-civil diplomacy or commercial diplomacy, namely diplomacy that prioritizes profitable negotiation efforts both parties in a peaceful manner with supporting agreements in the economic, political and security fields.*

*This research uses qualitative methods and descriptive and historical analysis with data collection techniques through literature studies sourced from several books, journals, articles and websites. This research uses the realism perspective and the theory of state sovereignty and diplomacy theory in analyzing the problems of the Tiran and Sanafir Islands dispute between Saudi Arabia and Egypt.*

*The results of this study indicate that Saudi diplomacy in the settlement of the Tiran and Sanafir Islands dispute is using Bourgeois-Civil Diplomacy or Commercial Diplomacy, namely by negotiating compromise and peaceful means supported by cooperation agreements in the fields of security, economy and politics. The agreement is contained in the Agreement of Maritime Boundary Demarcation 2016 which was signed in Cairo.*

***Keyword: Diplomacy, Dispute, Saudi Arabia, Egypt, Tiran and Sanafir***

## PENDAHULUAN

Permasalahan sengketa kedaulatan pulau Tiran dan Sanafir sudah ada sejak penciptaan garis administratif Turki-Mesir 1906 oleh Inggris yang terpaksa berakhir dengan perjanjian Lausanne 1923 yang menyebabkan Kerajaan Hijaz dibawah Syarif Husein<sup>1</sup> dan Kerajaan Mesir<sup>2</sup> merdeka dari Ottoman. Akhirnya, sejak perseteruan 1906 tersebut terbentuklah garis batas politik secara de facto, dimana garis itu menggambarkan perbatasan darat dan laut timur Mesir dengan Inggris yang memegang mandate/kekuasaan atas Palestina, Israel, dan Kerajaan Sharifian Hijaz yang nantinya akan menjadi cikal bagi berdirinya negara Arab Saudi.

Klaim kepemilikan Mesir atas Pulau Tiran dan Sanafir didasarkan pada alasan bahwa mereka merupakan bagian dari Semenanjung Sinai, yang dialokasikan dengan perjanjian 1906, sementara Arab Saudi didasarkan pada alasan tandingan bahwa mereka telah menjadi bagian vilayet Ottoman di Hijaz dan Kerajaan Hejaz di Arab Saudi sebagai negara penerus yang mewarisi hak hukum ke pulau-pulau di bawah hukum antarwaktu.

Permasalahan Pulau Tiran dan Sanafir mencuat kembali pada 1949, ketika geliat aneksasi Israel berjalan secara masif di perairan Teluk Aqaba dan berhasil merebut Pelabuhan Umm Rashrash. Melihat peristiwa tersebut, Mesir mengambil sikap untuk bersiaga menghadapi Israel untuk mempertahankan kawasannya. Angkatan laut Mesir diperintahkan untuk memblokade pelabuhan Israel yang baru didirikan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan secara efektif jika tidak menduduki Pulau Tiran, alasannya karena mereka bisa

mengapit Selat Tiran dari timur dan menghalangi jalur laut Israel. Peta angkatan laut Mesir menunjukkan bahwa pulau Tiran dan Sanafir adalah pulau milik Saudi.<sup>3</sup> Setelah mengetahui hal tersebut, mereka membuka komunikasi dengan Arab Saudi untuk menyikapi perihal geliat aneksasi yang dilancarkan oleh Israel dan mencari kesepakatan untuk meminta izin menduduki Pulau Tiran dan Sanafir dengan status dipinjam

Kemudian Mesir menghadapi kekalahan besar pada Krisis Suez yang terjadi Oktober 1956 – Maret 1957 yang dikenal sebagai Agresi Tripartit dan Perang Yom Kippur 1967 yang terjadi antara beberapa negara Arab seperti Mesir, Suriah dan Yordania.<sup>4</sup> Kekalahan ini menyebabkan Semenanjung Sinai, Pulau Tiran dan Sanafir diduduki dengan mudah untuk kedua kalinya oleh Israel dan tanpa hambatan sampai pada tahun 1982.

Setelah pertikaian mereda dan perlahan berhenti, Arab Saudi berulang kali protes melalui jasa Amerika Serikat untuk meminta bantuan atas tindakan pendudukan Israel atas Tiran dan Sanafir dan menuntut penarikan pasukannya. Pemerintah AS pun secara konsisten menyebut kedua pulau tersebut merupakan wilayah Saudi dan mereka melakukan beberapa pendekatan ke Tel Aviv sepanjang 1967 dan 1968 untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Di bawah protokol perjanjian, Kepulauan Tiran dan Sanafir ditempatkan di bawah kendali unit pasukan multinasional (MNF) yang ditempatkan di Pulau Tiran sebagai solusi perdamaian pasca peperangan. Atas rekomendasi Badan Perlindungan Lingkungan PBB

<sup>1</sup> Randall Baker, *King Hussain and the Kingdom of Hejaz* (Cambridge: Oleander Press, 1980), Hal.115.

<sup>2</sup> Martin Sicker, *The Middle East in the Twentieth Century* (Westport, CT: Praeger, 2001), bab 8, "Protectorat Inggris Mesir," 102–12.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Jenderal Ibrahim Mahmoud Effendi, *Haqa'iq wa-Asrar dengan Mustafa Bakri* (Sada Saluran TV Al-Balad, 28 April 2016), <https://www.youtube.com/watch?v=xdkdydeTho8>

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 37

bahwa ekosistem terumbu karang yang unik di pulau-pulau itu harus dilindungi dari industri wisata perikanan, menyelam, dan snorkeling yang berkembang pesat dan dari potensi eksplorasi minyak dan mineral, Mesir menyatakan pada tahun 1983, bahwa kedua pulau tersebut adalah kawasan alam yang dilindungi dan untuk tujuan ini, membentuk pasukan "polisi sipil" di sana. Secara administratif, kedua pulau tersebut berada di bawah yurisdiksi Provinsi Sinai Selatan.

Sesaat sebelum pengumuman yang dijadwalkan oleh pengadilan arbitrase internasional Taba tentang keputusannya pada tanggal 29 September 1988, pemerintah Saudi bergerak dengan sungguh-sungguh untuk memulai komunikasi formal langsung dengan pemerintah Mesir dengan tujuan utama yaitu meminta Mesir mengembalikan pulau Tiran dan Sanafir, yang telah dipinjamkan Saudi pada tahun 1950, Namun pembicaraan tersebut baru bisa dilaksanakan pada tahun 2016 ketika Mesir mulai membuka perundingan mengenai sengketa kedua pulau pada saat kunjungan Raja Salman ke Kairo.

## **METODE**

Metode penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk menjelaskan suatu kejadian atau fenomena agar dapat bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sarana untuk memahami masalah sosial manusia. Analisis yang digunakan dalam metode ini biasanya bersifat induktif, peneliti akan menjelaskan interpretasinya terhadap data yang dikumpulkan. Dalam metode ini, struktur penulisan hasil penelitian umumnya bersifat fleksibel untuk dapat menjelaskan kompleksitas suatu fenomena tertentu.

Dalam proses pengumpulan data penelitian terdapat tiga langkah yang diperlukan. Pertama, mengatur pembatasan

dalam pembahasan suatu masalah penelitian. Kedua, mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan, wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen, dan bahan visual. Ketiga membuat suatu aturan standar untuk mencatat dan merekam setiap informasi yang didapatkan. Dalam pengumpulan data informasi untuk penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder maupun data primer. Data primer didapatkan dari dokumen-dokumen dan publikasi resmi yang diakses maupun diunduh dari situs resmi negara yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun data sekunder didapatkan dari jurnal, karya tulis ilmiah (disertasi dan tesis), majalah, surat kabar, dokumen, makalah penelitian, buku teks, serta berbagai bahan lain yang diakses melalui studi pustaka di Perpustakaan Utama UNRI, Perpustakaan FISIP UNRI. Selain sumber-sumber fisik penelitian ini juga menggunakan referensi yang diakses dan diunduh melalui internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada 1949, pasukan Israel menduduki pelabuhan Umm Rashrash tanpa perlawanan. Pelabuhan yang telah dialokasikan ke Palestina dengan rencana partisi atau sekat yang terletak di ujung Teluk Aqaba dan terletak di antara pelabuhan Tran-Jordan di Aqaba dan Sinai Taba yang menjadi titik awal garis perbatasan Turki-Mesir tahun 1906.

Khawatir bahwa Israel mungkin bergerak ke barat untuk menduduki Ras Taba Mesir, Mesir menempatkan dua deretan artileri di tanjung Ras Nasrani yang berada di Teluk Nema di pantai Sinai. Saat itu angkatan laut Mesir diperintahkan untuk memblokir pelabuhan Israel yang baru didirikan, tetapi tidak dapat melakukannya secara efektif tanpa menduduki Pulau Tiran sehingga menggapit Selat Tiran dari timur.

Akhirnya sebuah langkah diambil oleh Raja Farouk dari Mesir, yaitu

mengirimkan delegasi yang meliputi keponakan raja yaitu Ismael Shereen sebagai kapten angkatan laut untuk menghadap Raja Abdul Aziz dari Arab Saudi untuk meminta izin agar kedua pulau tersebut dipinjam atau disewakan untuk tujuan pertahanan di Teluk Aqaba. Ibn Saud segera menyetujui permintaan Mesir untuk meminjamkan pulau-pulau itu ke Mesir, dengan cara yang sama seperti operasi Pinjam-Meminjam AS di Timur Tengah selama Perang Dunia II. Raja Saudi telah menginstruksikan para pejabatnya untuk menyerahkan kedua pulau itu kepada Farouk.<sup>5</sup>

Pada akhir 1966, Mesir dan Suriah menandatangani pakta pertahanan bersama yang ditujukan untuk melawan Israel. Pada Mei 1967, Presiden Mesir Nasser menerima laporan dari Soviet dan Suriah tentang penumpukan militer besar-besaran Israel di Dataran Tinggi Golan Suriah. Mesir mengupayakan untuk meredakan tekanan terhadap sekutu militernya dan mengerahkan pasukan dalam posisi bertahan di sepanjang perbatasannya dengan Israel. Israel menanggapi balasan dan menyatakan keputusan Mesir tersebut merupakan *causis belli* atau tindakan yang membenarkan untuk berperang.

Setelah itu, Israel pun melancarkan serangan mendadak dalam waktu singkat yang berakhir dalam enam hari dengan pendudukan Sinai Mesir, pulau Tiran dan Sanafir yang diklaim oleh Saud di Teluk Aqaba, Tepi Barat Yordania, termasuk Yerusalem, dan Dataran Tinggi Golan Suriah.

Setelah permusuhan berhenti, Arab Saudi telah berulang kali memprotes, melalui jasa Amerika Serikat agar pendudukan Israel atas Tiran dan Sanafir dihentikan dan menuntut penarikan pasukannya. Merujuk pada unit terdepan Saudi-Mesir yang mengosongkan pulau-pulau pada malam perang Juni, Israel

memberi tahu Amerika Serikat bahwa mereka telah memutuskan untuk menduduki pulau-pulau itu karena Arab Saudi telah mengizinkan orang Mesir untuk menduduki Tiran sebelum meninggalkannya tepat sebelum kedatangan pasukan Israel.

Komunikasi antara Amerika dan Israel yang pertama menghasilkan keberatan Israel yang tidak ingin angkat kaki dari Pulau Tiran dan Sanafir dan meskipun mereka harus angkat kaki, Israel memberi syarat agar Arab Saudi tidak meletakkan pangkalan militernya di kedua pulau tersebut dan memudahkan jalur kapal Israel untuk melewatinya atau menjadikannya jalur internasional. Amerika Serikat pun membalas bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena kedua pulau itu milik Saudi dan mereka punya kedaulatan yang tidak bisa diusik dari pihak luar.

Akhirnya di bawah protokol perjanjian, Kepulauan Tiran dan Sanafir ditempatkan di bawah kendali unit pasukan multinasional (MNF) yang ditempatkan di Pulau Tiran sebagai solusi perdamaian pasca peperangan. Atas rekomendasi Badan Perlindungan Lingkungan PBB bahwa ekosistem terumbu karang yang unik di pulau-pulau itu harus dilindungi dari industri wisata perikanan, menyelam, dan snorkeling yang berkembang pesat dan dari potensi eksplorasi minyak dan mineral dan pada tahun 1983 Mesir menyatakan bahwa kedua pulau tersebut adalah kawasan alam yang dilindungi dan untuk tujuan ini, membentuk pasukan "polisi sipil" di sana. Secara administratif, kedua pulau tersebut berada di bawah yurisdiksi Provinsi Sinai Selatan, karena sewaktu pulau itu diduduki oleh Israel, kedua pulau masih dalam naungan Mesir dibawah perjanjian peminjaman pulau Saudi-Mesir tahun 1950.

---

<sup>5</sup> Ibrahim Effendi interview

Pada tahun 1984, Saudi membuka negosiasi kembali untuk mengembalikan kedua pulau dari Mesir karena mengingat konflik dengan Israel sudah mereda. Saat itu, Raja Khaled dari Arab Saudi mendekati presiden Mesir Hosni Mubarak melalui presiden Sudan untuk meminta Mesir mengembalikan pulau-pulau tersebut, karena penarikan Israel kini telah selesai. presiden Mesir pun tidak membantah klaim Saudi dan meminta agar masalah ini ditunda sampai penarikan pasukan Israel dipastikan sudah selesai.

Kedua pulau ini sangat strategis dan penting bagi Saudi karena kedua pulau mempunyai sumber daya alam yang melimpah yaitu sumber daya hasil laut dan terdapat cadangan sumber daya Minyak yang ada di pulau Tiran serta Kepentingan strategis dalam aspek keamanan yang ingin ditingkatkan oleh Saudi melalui kedua pulau tersebut. Ada beberapa faktor yang mengharuskan Saudi selalu meningkatkan keamanannya. Pertama, peran mereka yang meneguhkan diri sebagai pimpinan negara negara Arab dalam segala aspek, mulai dari menjadi jembatan penghubung dengan dunia Barat, sampai urusan perdagangan minyak. Kedua, negara tersebut adalah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.<sup>6</sup> Ketiga, Saudi adalah produsen minyak dunia terbesar. Keempat, negara ini merupakan anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang sangat berpengaruh. Terakhir, faktor yang menjadikan Saudi selalu meningkatkan kekuatan strategis keamanannya adalah peringkat negara tersebut sebagai poros keamanan negara-negara teluk.<sup>7</sup>

Kemudian pada tahun 1988, Saudi kembali membuka negosiasi dengan Mesir, Namun pembicaraan tersebut baru bisa

---

<sup>6</sup> Anthony H. Cordesman dan Khalid R. Al Rodhan, *Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars (Volume 1)*, London: Praeger Security International, 2007, h. 164

<sup>7</sup> Ibid, Hal.165

dilaksanakan pada tahun 2016 ketika Mesir mulai membuka perundingan mengenai sengketa kedua pulau pada saat kunjungan Raja Salman ke Kairo yang menghasilkan perjanjian batas maritim Saudi-Mesir dengan beberapa kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak.

Faktor pendukung terjadinya kesepakatan diantara Saudi dan Mesir adalah salah satunya faktor bantuan ekonomi yang diberikan Saudi, bahkan bantuannya lebih besar dari bantuan yang diberikan dari Amerika Serikat. Sebelumnya, Saudi sudah beberapa kali membantu Mesir dalam bentuk bantuan dana khususnya. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Saudi telah memerikan bantuan ekonomi sebesar 17,25 miliar dolar AS. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak dari bantuan yang diberikan Amerika dalam kurun waktu yang sama dengan hanya memberikan bantuan sebesar 1,25 miliar dolar AS saja.<sup>8</sup>

Pola Bantuan Saudi kepada Mesir ini bisa dijelaskan menggunakan pandangan Baghat Korany dan Ali Dessouki yang mengungkapkan bahwa karakter interaksi negara di Timur Tengah pada era globalisasi adalah cepatnya pergerakan kapital ekonomi dan pertumbuhan bantuan luar negeri bagi suatu negara. Hal ini terjadi karena adanya labilitas geopolitik di kawasan yang rawan konflik ini. Dalam kondisi yang demikian negara-negara petrodolar ambil bagian sebagai donor bagi negara-negara berkembang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sally Khalifa Isaac, *Explaining The Patterns of the Gulf Monarchies's Assistance After the Arab Uprising*, Jurnal Mediterranean Politics, Vol. 19 No. 3, 2014, h. 417

<sup>9</sup> Baghat Korany dan Ali Dessouki, "Foreign Policy Approaches and Arab Countries: A Critical Evaluation and an Alternative Framework", dalam Baghat Korany dan Ali Dessouki (Ed), *The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of*

Mesir merupakan negara yang mengutamakan pragmatisme politik dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Namun hal ini adalah suatu kewajaran karena hakikatnya tujuan dari negara ada *survival*. Begitupun dalam hal penyerahan pulau Tiran dan Sanafir, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Keputusan Mesir menyerahkan kedua pulau tersebut merupakan sebuah bentuk anomali, berbeda dengan kasus peralihan kepemilikan pulau lainnya yang harus melalui konflik, Mesir dengan damai menyerahkan kepemilikan wilayah teritorinya itu walaupun ada hubungan yang sempit memanas karena klaim dari kedua pihak atas pulau Tiran dan Sanafir. Bila di analisa ada 3 faktor yang mempengaruhi kebijakan mesir menyerahkan kedua pulau ini yaitu aspek politik, ekonomi dan keamanan.

Situasi ini dapat dipahami jika melihat pada kondisi perekonomian Mesir yang sedang tidak stabil, khususnya ketika terjadinya revolusi pada tahun 2011 dan membutuhkan dana sokongan yang cukup besar untuk dapat memperbaiki kondisi dalam negerinya. Keputusan Mesir dengan memberikan kedua pulau tersebut yang bertujuan untuk mendapat konsesi ekonomi setidaknya dapat menjadi deskripsi karakteristik sebuah negara yang ingin tetap bertahan atau *survival*. Ada 3 aspek kerjasama pendukung dalam kesepakatan penyelesaian sengketa pulau Tiran dan Sanafir yaitu aspek politik, ekonomi dan keamanan.

Pada tanggal 8 April tahun 2016, Mesir dan Arab Saudi menyepakati sebuah perjanjian tentang penyerahan dua pulau yang dimiliki oleh Mesir, yakni Pulau Tiran dan Sanafir. Kesepakatan tentang penyerahan pulau itu juga bersamaan dengan disepakatinya beberapa perjanjian lain yang dilakukan ketika pimpinan

Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz melakukan kunjungan kenegaraan.<sup>10</sup>

Tindakan Mesir yang terlihat sebagai sebuah anomali ini justru mendapat dukungan dari pemerintahnya sendiri. Suara yang cenderung mendukung juga dikeluarkan oleh media Mesir, salah satunya adalah Egypt Today yang menerangkan bahwa penyerahan pulau itu memiliki pembenaran dan bukti yang merujuk pada sebuah artikel yang diterbitkan oleh NewYork Times pada tahun 1982 lalu.<sup>11</sup> Dalam artikel yang ditulis oleh David Shipler itu, pulau Tiran dan Sanafir merupakan dua pulau yang diserahkan oleh Saudi kepada Mesir pada tahun 1950.<sup>12</sup>

Sikap pemerintah Mesir yang sangat mudahnya menyerahkan wilayah kedaulatannya pada Arab Saudi sebenarnya bisa dikaitkan dengan sesuatu yang terjadi sebelum teretusnya kesepakatan ini. Sejak tahun 2013, Saudi telah menunjukkan komitmennya memberikan dukungan politik maupun finansial kepada pemerintahan Presiden Abdul Fatah As Sisi terlebih lagi ketika penggulingan pemimpin Mesir yaitu Mursi. Sebagai timbal baliknya, Mesir mendukung tindakan Saudi yang melakukan operasi militer di Yaman.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Pierre Emmanuel Duppont dan Brian McGarry, *The Egypt-Saudi Arabia Agreement on Tiran and Sanafir*, London Center of International Law Practice, April 2016.

<sup>11</sup> "1982 NY Times article proves Tiran and Sanafir Saudi Arabian", Egypt Today 15 Juni 2017, <https://www.egypttoday.com/Article/2/7728/1982-NY-Times-article-proves-Tiran-andSanafir-Saudi-Arabian> , diakses pada 27 April 2021.

<sup>12</sup> David K. Shipler, "Israelis Ask Egyptian to Redraw Border a Bit", New York Times 19 Januari 1982, diunduh dari <http://www.nytimes.com/1982/01/19/world/israelis-ask-egyptiansto-redraw-border-a-bit.html> , diakses pada 27 April 2021.

<sup>13</sup> Christopher M. Blanchard, Saudi Arabia: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service Report, 2016, h. 27

Selain itu, salah satu pendorong kesepakatan penyerahan Pulau Tiran dan Sanafir ini adalah pembangunan jembatan di atas laut merah yang menghubungkan kedua negara dan dua benua yaitu Afrika dan Asia. Lebih dari itu, Bahkan jika di akumulasikan Mesir dan Saudi menandatangani 17 kesepakatan investasi dan nota kesepahaman. perwakilan kedua negara menandatangani 17 kesepakatan investasi dan nota kesepahaman. Dari Arab Saudi sendiri diperkirakan menandatangani kesepakatan \$ 20 miliar untuk membiayai kebutuhan minyak Mesir selama lima tahun ke depan dan kesepakatan \$ 1,5 miliar lebih lanjut untuk mengembangkan wilayah Sinai. Pemerintah Saudi berencana untuk menginvestasikan \$ 4 miliar di Terusan Suez serta sektor energi dan pertanian Mesir.<sup>14</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Mesir meratifikasi perjanjian demarkasi perbatasan laut antara Mesir dan Arab Saudi. Berdasarkan perjanjian bilateral ini, Mesir akan menyerahkan hak teritorialnya atas dua pulau Laut Merah (Tiran dan Sanafir) kepada Arab Saudi. Pemungutan suara terakhir Dewan datang setelah persetujuan perjanjian oleh komite urusan legislatif dan konstitusional dan komite keamanan dan pertahanan nasional. Tiga puluh lima dari 43 anggota komite urusan legislatif dan konstitusional memberikan suara mendukung dari perjanjian bilateral. Setelah menyetujui kesepakatan, Komite merujuknya ke Dewan untuk pemungutan suara dalam sesi umum.

Selain pengembalian pulau Tiran dan Sanafir, dalam perjanjian demarkasi batas maritime 2016 juga disepakati beberapa kesepakatan dalam beberapa bidang aspek kerjasama yaitu di bidang politik, ekonomi dan keamanan negara.

---

<sup>14</sup> Shaul Shay, *Bridge Over Troubled Water-Egypt and Saudi Arabia To Build The Red Sea Bridge*, IPS Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy, Hal.1

Kemudian pada tahun 2017 perjanjian demarkasi batas maritime ini diratifikasi oleh Mesir sebagai bentuk komitmen untuk terus menjaga hubungan kerjasama dan mengakui kedaulatan Arab Saudi atas Pulau Tiran dan sanafir.

Adapun jawaban penelitian dalam menjawab rumusan masalah penelitian saya adalah Diplomasi Komersial sebagai alat negosiasi Saudi dalam penyelesaian Sengketa pulau Tiran dan Sanafir dengan Mesir. Dalam penyelesaian sengketa, selain menyelesaikannya dengan cara kompromi damai serta membawa landasan hukum yang kuat, Saudi juga melakukan negosiasi kerjasama dalam tiga aspek bidang lainnya untuk menguatkan hubungan Saudi-Mesir yaitu dalam bidang politik, keamanan dan ekonomi yang di dalam kerjasama bidang tersebut disepakati beberapa proyek besar, diantaranya pembangunan jembatan penghubung benua Asia-Afrika sebagai jalur perdagangan, pembangunan proyek kota futuristik NEOM, membangun ikatan aliansi sebagai bentuk pencarian kekuasaan dalam regional dan menjadi dua negara timur tengah yang kuat serta menghalau ancaman dari negara musuh yaitu Iran.

## SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini saya menggunakan teori kedaulatan negara dalam skripsi ini. Merujuk kepada pernyataan dari Jean Bodin dalam buku *'De Republica'* dan Thomas Hobbes yang menyatakan *"The doctrine of absolute state sovereignty"*, bahwa doktrin kedaulatan negara adalah mutlak. Hal ini juga yang juga dijalankan oleh Saudi dalam menjalankan penjagaan kedaulatannya atas Pulau Tiran dan Sanafir dengan Mesir.

upaya Arab Saudi dalam penyelesaian sengketa ini dengan upaya diplomasi yang dijalankan dengan proses

negosiasi dengan pihak Mesir, diplomasi yang dijalankan Arab Saudi adalah Diplomasi Borjuis-sipil atau diplomasi komersil. Dalam penyelesaian persengketaan Tiran dan Sanafir, Arab Saudi menyelesaikan permasalahan dengan lebih mengutamakan cara yang damai melalui negosiasi dengan pihak negara terlibat seperti Mesir, Amerika Serikat dan bahkan Israel untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut atau mencari *win-win solution* diantara mereka. Khusus dengan Mesir Arab Saudi juga menjalin kerjasama di bidang keamanan, ekonomi dan politik.

Dalam analisis perspektif penelitian ini, saya menggunakan perspektif realisme dalam pembahasan diplomasi penyelesaian sengketa Pulau Tiran dan Sanafir ini. Perspektif realisme digunakan karena Arab Saudi dan Mesir mengedepankan kepentingan nasionalnya demi mendapatkan legitimasi atas kedua pulau tersebut dengan berbagai dinamika yang terjadi yang dimulai dari awal kasus sengketa 1906 sampai selesainya Perjanjian demarkasi batas maritim disepakati tahun 2016 dan diratifikasi pada tahun 2017. Hal ini mengakibatkan kedua negara saling mempunyai kepentingan atas kedua pulau tersebut yang menyebabkan munculnya *struggle for power*.

Selain itu aktor yang berperan besar dalam memobilisasi permasalahan ini adalah negara, dimana dalam sengketa pulau-pulau ini, Arab Saudi dan Mesir menjadi aktor sentral yang berperan dalam proses negosiasi dan komunikasi intens untuk penyelesaian sengketa dan pengembalian Pulau Tiran dan Sanafir. Dinamika yang terjadi pun tidak terlepas dari beberapa egoistis dan keagresifan beberapa aktor negara dalam mengutamakan kepentingan negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baker, Randall. 1980. *King Hussain and the Kingdom of Hejaz* (Cambridge: Oleander Press)
- Cordesman, Anthony H. dan Khalid R. Al Rodhan. 2007. *Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars (Volume 1)*, (London: Praeger Security International).
- Dessouki, Ali. 2008. *Regional Leadership: Balancing off Costs and Dividends in the Foreign Policy of Egypt*. (The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Globalization, Kairo: The American University in Cairo Press)
- Dupont, Pierre Emmanuel dan Brian McGarry. 2016. *The Egypt-Saudi Arabia Agreement on Tiran and Sanafir*. London Center of International Law Practices.
- Isaac, Sally Khalifa. 2014. *Explaining The Patterns of the Gulf Monarchies Assistance After the Arab Uprising*. Jurnal Mediterranean Politics Vol. 19 No. 3
- NY Times article proves Tiran and Sanafir Saudi Arabian”, Egypt Today 15 Juni 2017, <https://www.egypttoday.com/Article/2/7728/1982-NY-Times-article-proves-Tiran-andSanafir-Saudi-Arabian> , diakses pada 27 April 2021.
- Shipler, David K., *Israelis Ask Egyptian to Redraw Border a Bit*, New York Times 19 Januari 1982, diakses dari: <http://www.nytimes.com/1982/01/19/world/israelis-ask-egyptiansto-redraw-border-a-bit.html> , diakses pada 27 April 2021.

Sicker, Martin. 2001. *The Middle East in the Twentieth Century* (Westport, CT: Praeger)

Blanchard, Christopher M.. 2016. *Saudi Arabia: Background and U.S. Relations*. Congressional Research Service Report.

Shay, Shaul. 2016. *Bridge Over Troubled Water-Egypt and Saudi Arabia To Build The Red Sea Bridge*. (IPS Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy)